

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi geografi berhubungan erat dengan konsep keruangan dan kewilayahan. Peran studi geografi sangatlah penting di berbagai bidang keilmuan terutama dibidang ekonomi yang terkait dengan masalah pengangguran terbuka. Pengangguran merupakan sebuah masalah yang kompleks karena bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga menyebabkan kerentanan sosial bahkan kemiskinan (Wahyuni et al., 2020). Sedangkan Konsep pengangguran menurut standar definisi nasional adalah jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan (Alkatheri & Saad, 2019, p. 23).

Tingkat pengangguran yang terus-menerus tinggi dalam jangka panjang akan menimbulkan konsekuensi yang buruk di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Setiap individu memandang pengangguran sebagai situasi yang tidak diinginkan dan menyebabkan kondisi ekonomi yang tidak aman, baik dalam kesempatan hidup maupun kondisi hidup. Di tahun 2021 ini masyarakat telah mengalami perubahan periode transformasi yang drastis, sering digambarkan sebagai revolusi industri keempat atau lebih dikenal sebagai industri 4.0. Dengan ditandai menjamurnya teknologi yang semakin kompleks bersamaan dengan bidang fisik, digital, dan biologis. Implikasi dari industri 4.0 pada tenaga kerja, dengan fokus khusus pada *reskilling* yang diperlukan untuk mendukung masa depan pekerjaan di era baru. *Reskilling* merupakan program pelatihan bagi tenaga kerja sebagai bekal baru untuk ditempatkan pada posisi yang berbeda. Mengingat perubahan yang rumit dan semakin cepat belum pernah terjadi sebelumnya, perubahan ini mengharuskan angkatan kerja memiliki keterampilan di bidang ilmu teknologi (Rotatori et al., 2021).

Pengangguran perlu mendapatkan perhatian berkelanjutan dari setiap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi dengan didorong oleh perubahan struktural negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama setiap perekonomian negara. Ini adalah fakta standar negara itu dengan kondisi ekonomi yang baik secara operasional dan efisien dikarenakan pertumbuhan ekonomi menjadi penggerak dalam menjalankan sebuah program untuk menekan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari kondisi region tiap wilayah disuatu negara. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk melihat distribusi perekonomian disetiap regionnya, karena region-region tersebut baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sangat mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya dengan melihat angka pengangguran dan tenaga kerja guna mendorong ekonomi regional.

Provinsi Jawa Tengah terletak di pulau Jawa dan memiliki ibukota di Semarang. Wilayah provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sekitar 32.801 km². Wilayah ini berbatasan dengan tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring bertambahnya waktu, jumlah penduduk di provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan tiap tahunnya. Faktor jumlah penduduk dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja, dimana jumlah angkatan kerja akan mempengaruhi angka pengangguran di tiap-tiap wilayah. Berdasarkan *The Labour Force Concept* yang disampaikan oleh organisasi ILO kelompok yang termasuk kedalam angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja yang ikut berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi disebut sebagai kelompok tenaga kerja sedangkan untuk angkatan kerja yang tidak aktif dan sedang mencari pekerjaan digolongkan sebagai pengangguran.

Berikut merupakan angkatan kerja di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021:

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Selisih dengan Tahun Sebelumnya
2010	16.856.330	-
2011	17.026.107	169.777
2012	17.513.488	487.381
2013	17.524.022	10.534
2014	17.547.026	23.004
2015	17.298.925	-248.101
2016	17.310.000	11.075
2017	18.010.612	700.612
2018	18.059.895	49.283
2019	18.260.508	200.613
2020	18.780.000	519.492
2021	23.527.281	4.747.281

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021

Berdasarkan tabel angkatan kerja di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja rata-rata mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 248.101 jiwa, dikarenakan jumlah penduduk kelompok umur yang siap kerja lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kenaikan angkatan kerja paling besar nilainya terjadi pada tahun 2021 dikarenakan pandemi COVID 19 yang melanda sehingga berdampak bagi masyarakat terutama mengenai masalah jumlah angkatan kerja yang menumpuk dan perubahan sistem penyerapan tenaga kerja beralih ke *online*. Pengaruh pandemi COVID 19 terjadi di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Untuk kenaikan jumlah angkatan kerja terbesar lainnya terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan jumlah 700.612 jiwa.

Di sisi lain kondisi IPM perlu diperhatikan dalam meninjau angka pengangguran terbuka, karena IPM merupakan modal manusia yang menyangkut beberapa faktor yaitu dimensi kesehatan yang meliputi angka harapan hidup, dimensi pengetahuan yang meliputi lama sekolah, dan dimensi hidup layak yang meliputi kemampuan daya beli untuk kebutuhan makanan dan non makanan. IPM berhubungan dengan kualitas hidup SDM yang diperlukan setiap wilayah agar terhindar dari pengangguran terbuka. Berikut merupakan data angka IPM provinsi Jawa Tengah dan IPM nasional Tahun 2010-2021:

Tabel 1.2 Angka IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM Nasional Tahun 2010-2021:

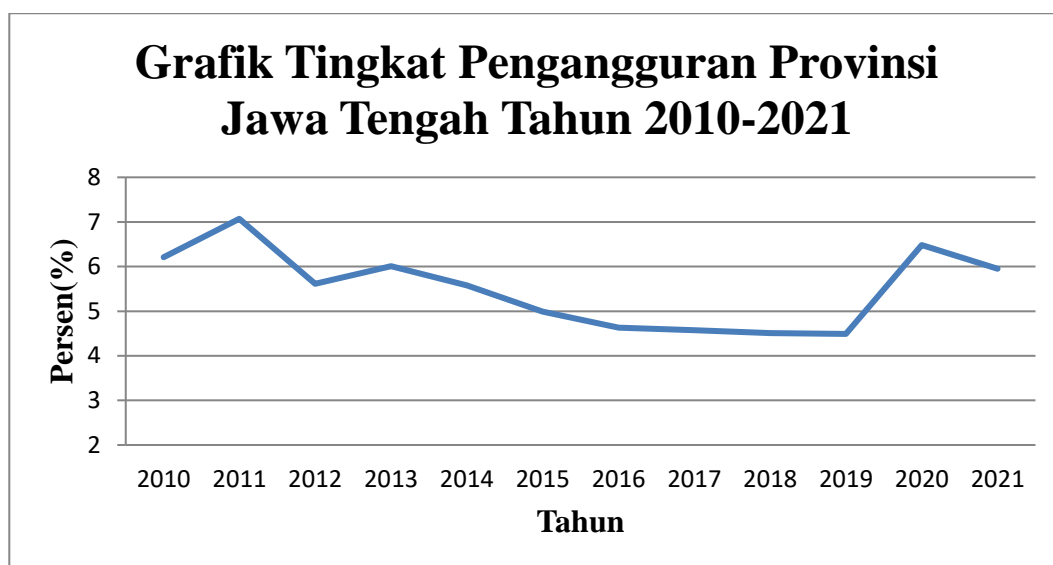
Tahun	IPM Provinsi	IPM Nasional
2010	66,08	67,09
2011	66,64	66,53
2012	67,21	67,70
2013	68,02	68,31
2014	68,78	68,90
2015	69,49	69,55
2016	69,98	70,18
2017	70,52	70,81
2018	71,12	71,39
2019	71,73	71,92
2020	71,87	71,94
2021	72,16	72,29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel angka IPM provinsi Jawa Tengah diatas mengalami kenaikan tiap tahunnya, tren tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat provinsi Jawa Tengah meningkat walaupun berjalan dengan lambat. Di sisi lain, angka IPM provinsi Jawa Tengah selalu dibawah standar nasional tiap tahunnya dimana IPM nasional terus mengalami kenaikan. IPM berhubungan dengan SDM, SDM yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah dan berpengaruh dalam membentuk tenaga kerja yang berkualitas.

Indeks pembangunan manusia provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan tiap tahunnya belum bisa menangani masalah pengangguran terbuka. Peran pemerintah provinsi Jawa Tengah belum maksimal dalam menangani IPM yang masih dibawah standar nasional dan pengangguran terbuka. Berikut merupakan Grafik angka pengangguran terbuka provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021

Gambar 1.1 Grafik Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021.

Berdasarkan diagram diatas, angka pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang kurang konsisten dalam menangani kasus pengangguran terbuka. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 dengan angka diatas 7,07 persen, sedangkan untuk penurunan paling rendah terjadi pada Tahun 2019 dengan angka 4,51 persen. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan angka pengangguran yang signifikan dari 4,5 persen menjadi 6,5 persen. Tren ini menunjukkan kondisi ketersediaan lapangan kerja di provinsi Jawa Tengah kurang memadai, walaupun angka IPM yang terus meningkat tiap tahunnya. Tingkat angka pengangguran di provinsi Jawa Tengah masih

dibilang tinggi dan belum pernah kurang dari angka 4 % pada periode 2010 - 2021.

Pengambilan lokasi penelitian di provinsi Jawa Tengah dikarenakan letak geografis provinsi Jawa Tengah sebagai penghubung antar provinsi di pulau Jawa. Selain itu provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Jawa Timur baik dari segi bahasa daerah, aktivitas ekonomi yang bukan mengarah ke sektor industri, dan yang paling penting adalah dari tiga provinsi tersebut provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pengangguran terbuka yang cenderung lebih tinggi. Berikut adalah data tingkat pengangguran terbuka tiap provinsi di pulau Jawa:

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka tiap Provinsi di Pulau Jawa Periode 2010-2021:

Tahun	Provinsi					
	Banten	Jawa Barat	DKI Jakarta	DIY	Jawa Tengah	Jawa Timur
2010	13,68	-	11,05	5,69	6,21	4,25
2011	13,06	-	10,8	4,32	7,07	5,33
2012	10,13	-	9,87	3,86	5,61	4,09
2013	9,9	9,16	8,63	3,24	6,01	4,3
2014	9,07	8,45	8,47	3,33	5,68	4,19
2015	9,55	8,72	7,11	4,07	4,99	4,47
2016	8,92	8,89	-	5,61	-	4,21
2017	9,28	8,22	7,67	3,02	4,57	4
2018	8,47	8,23	6,24	3,35	4,47	3,99
2019	8,11	8,04	6,22	3,14	4,44	3,92
2020	10,64	10,46	10,95	4,57	6,48	5,84
2021	-	9,82	-	4,56	5,95	5,74

Sumber: BPS Statistik 2010-2021.

Masalah utama dari penelitian ini adalah masih tingginya angka pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah yang berdampak negatif pada angkatan kerja, selain itu distribusi geografis pengangguran terbuka membutuhkan data tenaga kerja. Selain itu provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang terhubung satu sama lain juga terjadi pada kawasan Pantai Selatan, kawasan bagian Tengah, dan kawasan pantai Utara. Ketiga wilayah

tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang berbeda, akan tetapi tiap-tiap wilayah kabupaten/kota memiliki keterkaitan dengan wilayah tetangganya. Dari uraian tersebut peneliti terdorong untuk menganalisis tren pengangguran terbuka dan mengetahui faktor penyebabnya dengan menggunakan studi geografi. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi permasalahan pengangguran terbuka.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana tren sebaran geografis pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan angka pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tren sebaran geografis pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021.
2. Menganalisis faktor penyebab pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat untuk penyusunan skripsi atau kelulusan sarjana tingkat S1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah mengenai masalah pengangguran terbuka.
3. Sebagai sumber referensi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai masalah pengangguran terbuka.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

Pengangguran terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sudah mulai untuk bekerja pada periode yang sama dan yang aktif mencari pekerjaan di beberapa pekerjaan waktu selama satu bulan sebelumnya. Orang-orang tidak bekerja atau menganggur dianggap tidak aktif dan dikeluarkan dari angkatan kerja (Brandolini et al., 2006).

Konsep pengangguran didefinisikan berdasarkan standar dan definisi nasional. Definisi standar yaitu jumlah angkatan kerja yang tanpa pekerjaan, tetapi mencari pekerjaan. Selagi definisi nasional menyebutnya sebagai jumlah individu tidak kerja. Ini juga diartikan sebagai orang yang tidak bekerja, tetapi mau dan mampu bekerja. Terlepas dari definisi spesifiknya, semua definisi setuju bahwa mencari pekerjaan dan kemampuan bekerja merupakan karakteristik utama dari pengangguran (Alkatheri & Saad, 2019, p. 23). Faktor penyebab pengangguran bergantung pada jumlah angkatan kerja, tenaga kerja produktif, pertumbuhan ekonomi, dan IPM (Hahn, 2011).

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka disebabkan oleh berkurangnya jumlah lowongan pekerjaan yang tidak dibarengi dengan penambahan jumlah tenaga kerja. Akibatnya dalam segi perekonomian semakin banyak angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

2. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran disebabkan oleh banyak faktor, faktor-faktor tersebut adalah besar kecilnya perusahaan, mesin pengelola yang digunakan, dan jenis kegiatan perusahaan. Di negara berkembang banyak terjadi kasus dimana tenaga kerja yang terlalu banyak tidak sebanding dengan kegiatan ekonomi supaya proses pengerjaannya lebih efisien.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman biasa dijumpai di sektor pertanian dan sektor perikanan. Kendala cuaca dan musim yang buruk mengakibatkan mereka harus menganggur pada musim tertentu. Contohnya seperti nelayan yang harus terpaksa menganggur dikarenakan cuaca yang sedang hujan.

4. Setengah Pengangguran

Setengah pengangguran adalah mereka mungkin hanya bekerja selama dua minggu atau bahkan empat jam per harinya. Orang-orang tersebut digolongkan sebagai kelompok setengah pengangguran. Kondisi setengah pengangguran disebabkan oleh tiga faktor diantaranya adalah proses mencari pekerjaan, upah yang tidak sesuai, dan efisiensi upah (Kaufman dan Hotckiss, 1999).

Faktor yang menyebabkan pengangguran pada kondisi negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dikerjakan tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan terdistribusi dengan baik. Subjek yang menjadi pengaruhi mengenai masalah pengangguran terbuka diantaranya adalah jumlah penduduk, UMR, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas rendah yang dimiliki negara berkembang guna meningkatkan output total harus diimbangi dengan penurunan tingkat perkembangan penduduk, sehingga penghasilan riil per kapita akan dapat meningkat. Dengan kapasitas yang rendah untuk menaikkan output totalnya dan tanpa diimbangi dengan turunnya tingkat perkembangan penduduk, maka akan terjadi penundaan pembangunan ekonomi (Suparmoko, 1992:45). Metode yang digunakan untuk mengetahui faktor pengangguran terbuka yaitu dengan cara perhitungan data statistik lalu menganalisa data sekunder guna mengetahui *track record* distribusi pengangguran terbuka tiap-tiap wilayah. Perhitungan data statistik dapat mendistribusikan tingkat

pengangguran terbuka. Berikut merupakan faktor penyebab dari pengangguran terbuka:

a. Tenaga Kerja

Human resources atau biasa disebut sumberdaya manusia termasuk seluruh penduduk dari berbagai golongan. Menurut sudut pandang penduduk sebagai faktor produksi, tidak semua penduduk dapat berperan sebagai produsen. Hanya penduduk yang termasuk golongan tenaga kerja (*man power*) yang dianggap sebagai produsen (Suparmoko, 1997). Konsep tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, angkatan kerja tergolong dalam tenaga kerja yang berperan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa. Orang yang bekerja dan menganggur termasuk ke dalam golongan angkatan kerja. Orang yang bekerja berperan aktif dalam angkatan kerja yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan orang yang mampu bekerja dan sedang mencari pekerjaan digolongkan dalam kelompok pengangguran (Payaman Simanjuntak, 1985). Lingkungan ekonomi tertekan dan dampak terkait tenaga kerja telah banyak meningkatkan kebutuhan dan tuntutan pelajar untuk memperlengkapi kembali kemampuan mereka (Gontkovičová et al., 2015).

b. Pasar Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah sosial utama di banyak negara. Setiap individu memandang pengangguran sebagai keadaan yang tidak diinginkan yang meningkatkan ketidakamanan ekonomi dan jika berkepanjangan, akan terjadi efek negatif pada berbagai macam kesempatan hidup dan kondisi kehidupan. Dari sudut pandang perusahaan, pekerjaan manual berkonsentrasi pada menghasilkan bilangan diskrit hasil konkret.

Pengangguran muda di pasar kerja termasuk kategori cukup rentan, masalah penyediaan lapangan kerja yang efektif dan masalah kebijakan

publik. Tentunya keputusan dari masalah ini terhalang secara sosial, ekonomi, dan hukum lingkungan politik di kehidupan kita, jadi tindakan yang tepat harus diambil secara bersamaan. Untuk mengevaluasi pengangguran kaum muda dari sudut ekonomi, data statistik dan indeks ekonomi dapat dijadikan sebagai sumber informasi utama (Starineca & Voronchuk, 2015).

c. Kebijakan Pasar Tenaga Kerja

Kebijakan pasar tenaga kerja aktif adalah instrumen utama yang berusaha ditingkatkan oleh negara kesejahteraan prospek pekerjaan dari individu yang menganggur. Kebijakan pasar tenaga kerja dapat dianggap sebagai satu jenis kebijakan sosial dengan tujuan memberikan jaminan sosial tanpa harus melibatkan redistribusi (Fredriksson, 2021, p. 2).

Prinsip-prinsip analisis Keynesian Baru, termasuk penerimaan tingkat pengangguran alami, gagasan bahwa fluktuasi siklus bisnis dibawa dan diperburuk oleh friksi yang mencegah pasar menyesuaikan diri sendiri setelah guncangan, ketergantungan pada kebijakan moneter sebagai alat yang disukai untuk mencapai stabilisasi ekonomi, dan keyakinan bahwa ekonomi makro kebijakan tidak boleh digunakan untuk membuat penyesuaian dalam permintaan yang efektif atau agregat (Theodore, 2007).

Kebijakan pasar tenaga kerja terdiri dari berbagai intervensi: layanan ketenagakerjaan publik yang memfasilitasi pencocokan antara pencari kerja dan pemberi kerja, program pelatihan yang meningkatkan kemampuan kerja melalui sumber daya manusia. Akumulasi modal, penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan pekerjaan tambahan di sektor publik, dan pekerjaan bersubsidi yang melibatkan insentif perekrutan kepada pemberi kerja melalui, misalnya, subsidi upah (Fredriksson, 2021).

Bentuk ekonomi *statecraft* didedikasikan untuk menahan tekanan inflasi, mendorong pertumbuhan pekerjaan dan memperkuat etos kerja di

antara pengangguran. Yang fleksibel dan responsif secara individual sistem kesejahteraan telah diusulkan sebagai mitra yang diperlukan untuk fleksibel dan pasar tenaga kerja yang semakin individual (Theodore, 2007).

Layanan Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab utama untuk implementasi. Mereka bertujuan untuk menyampaikan program melalui "kemitraan lokal", termasuk otoritas lokal, sukarela organisasi, perguruan tinggi dan penyedia pelatihan swasta. Yang spesifik pengaturan diharapkan bervariasi dari satu area ke area lain sesuai dengan kebutuhan lokal dan struktur kelembagaan. Area langsung dari ketidakpastian adalah bagaimana dan mengapa lembaga lokal harus bersatu, karena kontrak untuk pengiriman sebagian besar elemen akan menjadi dialokasikan melalui penawaran kompetitif dan banyak dari mereka akan menjadi saingan dana, penempatan peserta dan pemberi kerja (Turok & Webster, 2012).

d. Angkatan Kerja

Pada tahun 2021 ini, masyarakat telah memulai periode transformasi dramatis, sering digambarkan sebagai revolusi industri keempat atau lebih dikenal sebagai industri 4.0. Ini ditandai dengan menjamurnya teknologi yang semakin kompleks yang dibawanya bersama dunia fisik, digital, dan biologis. Implikasi dari industri 4.0 pada tenaga kerja, dengan fokus khusus pada *reskilling* yang diperlukan untuk mendukung masa depan pekerjaan di era baru. Mengingat kecepatan dan kerumitan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perubahan ini mengharuskan angkatan kerja memiliki keterampilan di bidang ilmu teknologi (Rotatori et al., 2021).

e. Distribusi Geografis

Letak geografis pengangguran sering dianggap sebagai rambu-rambu sosial ekonomi kinerja daerah. Akibatnya, terdapat perbedaan analisis pengangguran regional memiliki menarik minat yang meningkat pada literatur ekonomi. Terlepas dari minat ini, disparitas pengangguran

regional tidak mewakili inti eksklusif teori pembangunan ekonomi daerah (Cracolici et al., 2011).

Disparitas pengangguran regional menunjukkan kinerja pasar tenaga kerja daerah dan mengacu pada masalah daerah. Inilah alasan yang sangat penting bagi pemerintah yang ingin menghilangkan ketimpangan daerah menangani pasar tenaga kerja regional dengan lebih serius. Alasan kedua adalah faktor yang digunakan untuk menggambarkan disparitas pengangguran antar negara tidak dapat digunakan untuk menggambarkan disparitas pengangguran regional. Jaminan sosial, pensiun dan perbedaan pajak sistem diindikasikan sebagai alasan disparitas pengangguran antar negara (Güçlü, 2017).

Tujuan utama empiris para peneliti tentang pengangguran regional biasanya adalah untuk meneliti persistensi perbedaan pengangguran dan untuk mengembangkan model yang menyelidiki determinannya. Analisis yang diterapkan terutama didasarkan pada data deret waktu, menggunakan statistik standar metode, baik parametrik dan non-parametrik (Cracolici et al., 2011).

Kesenjangan ekonomi Jangka pendek akan memacu setidaknya beberapa migrasi dari daerah tertinggal ke daerah makmur. Apakah mobilitas tenaga kerja merupakan gaya penyesuaian yang bertahap menyebabkan disparitas yang ada atau apakah perbedaan menjadi lebih besar dan lebih terasa saat pekerja bermigrasi. Sudut pandang konvensional adalah itu mobilitas tenaga kerja akan mengarah pada proses konvergensi dan akan menghilangkan disparitas spasial sejauh hanya mengkompensasi perbedaan antara upah dan tingkat pengangguran (Suedekum, 2005).

Masalah ini selalu dianggap sangat sensitif, perbedaan antar daerah karena kondisi lingkungan dianggap sebagai fenomena alam. Perbedaan tingkat ekonomi dan sosial, paling sering dijelaskan oleh nilai produk domestik bruto per kapita dan tingkat pengangguran. Sikap negatif terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial disebabkan oleh aspek sosial

dan ekonomi dari masalah, ketidakmampuan untuk memperoleh penghasilan penghasilan tidak adil secara sosial, membatasi perkembangan tenaga kerja. Apalagi kinerja ekonominya yang rendah dari unit teritorial tersebut menimbulkan kerugian ekonomi juga dari perspektif ekonomi nasional. Ini memaksa negara untuk bertindak menciptakan kondisi untuk pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan di semua wilayah mereka (Daňová & Vozárová, 2020).

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Maria Francesca, dkk (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Distribusi Geografis Pengangguran: Analisis Perbedaan Provinsi di Italia” yang bertujuan menginterpretasi kesenjangan pengangguran lokal di pasar tenaga kerja dan mengetahui disparitas pengangguran regional tingkat Provinsi di Italia. Metode penelitian yang digunakan adalah Menggunakan strategi empiris umum berdasarkan model teoritis dan struktur probabilistik data spasial. Model empiris mencakup faktor equilibrium dan disequilibrium. Hasil dari penelitian tersebut angka partisipasi kerja kelompok wanita lebih tinggi daripada kelompok pria, akan tetapi faktanya angka koefisien korelasi antara pengangguran pria dan wanita masing-masing adalah -0,80 dan -0,56. Lebih khusus lagi analisis gender statistik deskriptif menunjukkan perilaku partisipasi perempuan lebih banyak terkait dengan dinamika pasar tenaga kerja. Perbedaan pengangguran menjadi ciri khas pasar tenaga kerja di Italia terutama mengenai permintaan tenaga kerja. Kebijakan tenaga kerja perlu memperhatikan fitur regional tertentu untuk menyeimbangkan *trade-off* antara keuntungan ekonomi efek aglomerasi, terkait dengan integrasi ekonomi dan ketidaksetaraan yang ditimbulkan.

Sarham, Awad Murthada (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Variasi Spasial Pengangguran di Yordania dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis” yang bertujuan untuk menentukan gap pengangguran yang terjadi antara kaum wanita dan kaum pria di Yordania. Penelitian ini menggunakan metode Observasi secara tidak langsung menggunakan data sekunder

menggunakan validasi statistik regresi antar variabel-variabel yang terkait dengan pengangguran dan dipetakan menggunakan sistem informasi geografis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengangguran yang terjadi di Yordania disebabkan oleh kurangnya konsistensi kebutuhan pasar kerja dan spesialis sistem pendidikan. Dimana angka pengangguran wanita lebih tinggi daripada pria dengan angka 24,1% berbanding 13,3% di tahun 2016 dan pada tahun 2015 pengangguran pria memiliki angka 11% sedangkan pengangguran wanita memiliki angka 22,5%. Rendahnya partisipasi wanita ini menunjukkan satu wanita berpartisipasi dengan delapan wanita di pasar tenaga kerja. Selain itu, kaum wanita sering mendapatkan diskriminasi dalam masalah upah kerja. Kaum wanita mendapatkan sepertiga dari pendapatan kaum pria. Kasus ini sering terjadi dalam perusahaan swasta di Yordania. Lemahnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, faktor demografi, tren permintaan tenaga kerja, dan kebijakan ketenagakerjaan di sektor publik menyebabkan meningkatnya pengangguran di Yordania.

Enrique López-Bazo (1999) dalam penelitiannya yang berjudul “Distribusi Geografis Pengangguran di Spanyol” yang bertujuan untuk menganalisis evolusi distribusi tingkat pengangguran di Spanyol. Bentuk distribusinya harus berupa bukti langsung mengenai keberlangsungan tingkat pengangguran dan tidak hanya menyangkut jumlah disparitas, akan tetapi juga bentuk cluster pengangguran di wilayah yang terpisah. Sehingga diperoleh faktor dan efek dari disparitas pengangguran di Spanyol. Metode yang digunakan adalah heterogenitas distribusi spasial dan menggunakan statistik regresi keterampilan dan ketidakcocokan sektoral faktor demografi. Hasilnya tingkat pendidikan angkatan kerja mengalami peningkatan luar biasa di semua wilayah Spanyol dalam beberapa dekade terakhir. Persentase angkatan kerja yang setidaknya memulai sekolah menengah untuk keseluruhan perekonomian Spanyol pada tahun 1980 sebesar 26,2%, sedangkan pada tahun 1997 meningkat hingga 67,0%. Di 1980 persentase untuk wilayah dengan rata-rata pendidikan terendah adalah 10,3% dan provinsi dengan tingkat tertinggi 39,6%. Pada tahun 1997 perbedaan mutlak pada persentase tersebut serupa, tetapi kemudian nilai untuk

provinsi dengan yang terendah sekitar 50%. Oleh karena itu, tampaknya tidak mungkin lebih jauh peningkatan pendidikan saja dapat berkontribusi untuk mengurangi disparitas. Selain itu, ketidakcocokan antara penawaran pendidikan dan permintaan tenaga kerja adalah beberapa wilayah Spanyol khususnya menyolok. Akibatnya, tingkat pendidikan penganggur rata-rata di atas rata-rata salah satu pekerja. Faktor-faktor yang berkontribusi paling besar pada penjelasan perbedaan spasial dalam tingkat pengangguran adalah demografis. Saat menghilangkan efek pada perbedaan partisipasi perempuan dan terutama dalam persentase populasi muda tingkat pengangguran jauh lebih merata di seluruh provinsi Spanyol. Ini terjadi pada pertengahan tahun delapan puluhan dan bahkan lebih nyata lagi pada akhir tahun sembilan puluhan.

Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Maria Francesca, dkk (2007)	Distribusi Geografis Pengangguran: Analisis Perbedaan Provinsi di Italia.	1. Mengintepretasi kesenjangan pengangguran lokal di pasar tenaga kerja. 2. Mengetahui disparitas pengangguran regional tingkat Provinsi di Italia. 3. Menentukan faktor yang mempengaruhi pengangguran regional tingkat Provinsi di Italia.	Menggunakan metode strategi empiris umum berdasarkan model teoritis dan struktur probabilistik data spasial.	Angka partisipasi kerja kelompok wanita lebih tinggi daripada kelompok pria, akan tetapi faktanya angka koefesien korelasi antara pengangguran pria dan wanita masing-masing adalah -0,80 dan -0,56. Partisipasi perempuan lebih banyak terkait dengan dinamika pasar tenaga kerja. Perbedaan pengangguran menjadi ciri khas pasar tenaga kerja di Italia terutama mengenai permintaan tenaga kerja.

Lanjutan Tabel 1.4 Ringsan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Sarham, Awad Murthada (2020)	Variasi Spasial Pengangguran di Yordania dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis Variasi fenomena Pengangguran di Yordania. 2. Menganalisis Pola Distribusi Pengangguran di Yordania. 3. Menentukan gap yang terjadi antara pengangguran kaum pria dan Wanita 	Observasi secara tidak langsung menggunakan data sekunder dan validasi statistik regresi antar variabel-variabel yang terkait dengan pengangguran dan dipetakan menggunakan sistem informasi geografis.	Pengangguran yang terjadi di Yordania disebabkan oleh kurangnya konsistensi kebutuhan pasar kerja dan spesialis sistem pendidikan. Dimana angka pengangguran wanita lebih tinggi daripada pria dengan angka 24,1% berbanding 13,3% di tahun 2016 dan pada tahun 2015 pengangguran pria memiliki angka 11% sedangkan pengangguran wanita memiliki angka 22,5%. Rendahnya partisipasi wanita ini menunjukkan satu wanita berpartisipasi dengan delapan wanita di pasar tenaga kerja. Selain itu, kaum wanita sering mendapatkan diskriminasi dalam masalah upah kerja. Kaum wanita mendapatkan sepertiga dari pendapatan kaum pria. Kasus ini sering terjadi dalam perusahaan swasta di Yordania.

Lanjutan Tabel 1.4 Ringsan Penelitian Sebelumnya

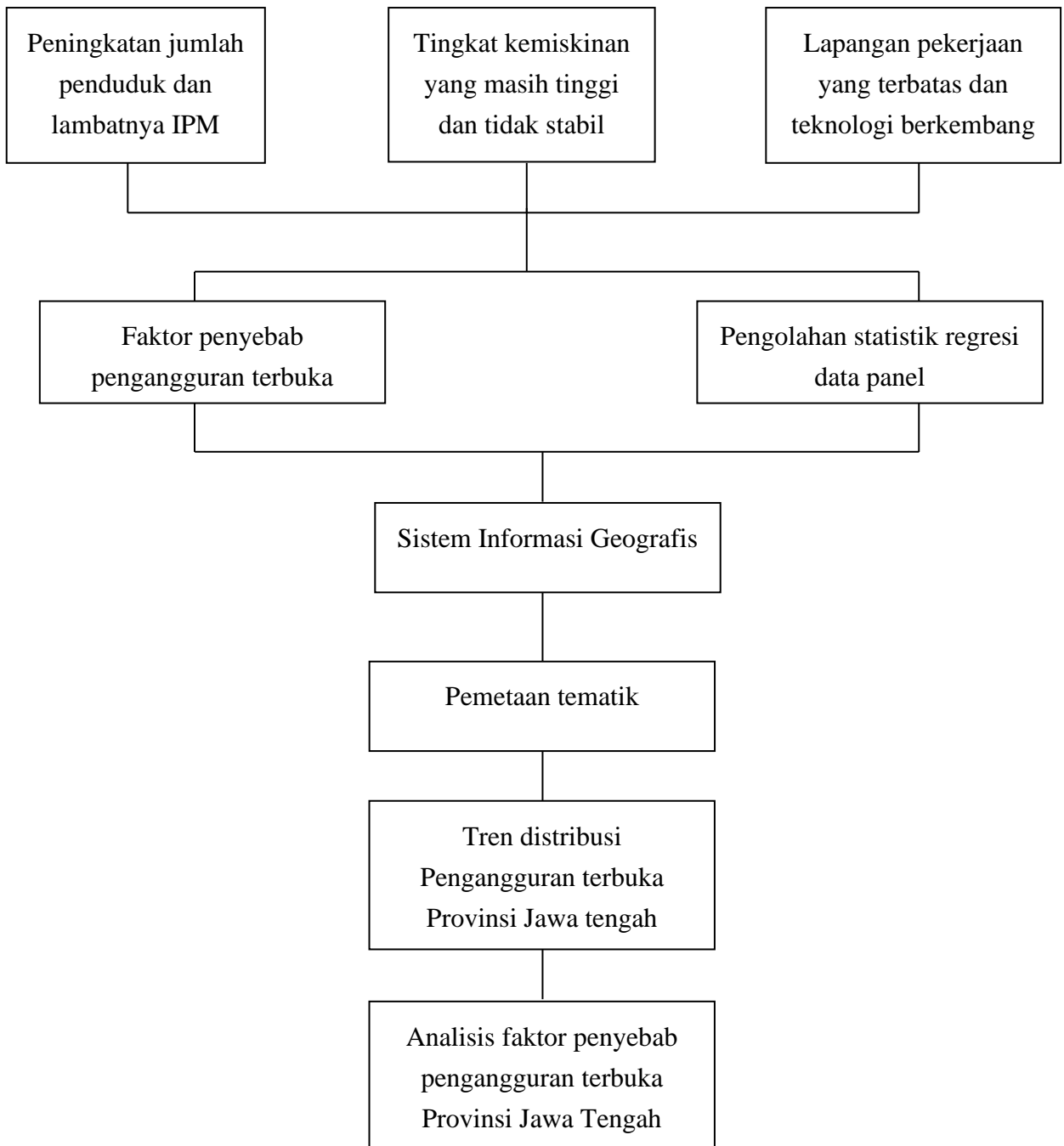
Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Enrique López-Bazo (1999)	Distribusi Geografis Pengangguran di Spanyol.	<p>1. Menganalisis Evolusi distribusi pengangguran di Spanyol</p> <p>2. Menganalisis faktor dan efek disparitas pengangguran di Spanyol</p>	Metode yang digunakan adalah heterogenitas distribusi spasial dan menggunakan statistik regresi keterampilan dan ketidakcocokan sektoral faktor demografi	<p>Persentase angkatan kerja yang setidaknya memulai sekolah menengah untuk keseluruhan perekonomian Spanyol pada tahun 1980 sebesar 26,2%, sedangkan pada tahun 1997 meningkat hingga 67,0%. Di 1980 persentase untuk wilayah dengan rata-rata pendidikan terendah adalah 10,3% dan Provinsi dengan tingkat tertinggi 39,6%. Pada tahun 1997 perbedaan mutlak pada persentase tersebut serupa, tetapi kemudian nilai untuk provinsi dengan yang terendah sekitar 50%. Saat menghilangkan efek pada perbedaan partisipasi perempuan dan terutama dalam persentase populasi muda tingkat pengangguran jauh lebih merata di seluruh provinsi Spanyol.</p>

1.6 Kerangka Penelitian

Pengangguran terbuka merupakan sebuah fenomena yang terjadi di berbagai daerah. Disparitas pengangguran terbuka menunjukkan kinerja tenaga kerja daerah dan mutu SDM daerah. Modal manusia (SDM yang berkualitas) sangat dibutuhkan dalam menekan angka pengangguran terbuka. Selain itu peran pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ekonomi daerah sangat penting dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pasar tenaga kerja berbentuk layanan ketenagakerjaan publik yang memfasilitasi pencocokan antara pencari kerja dan pemberi kerja, program pelatihan yang meningkatkan kemampuan kerja melalui sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam lingkup tenaga kerja harus diimbangi dengan kebutuhan perusahaan. Seiring perkembangan zaman, para pekerja diharuskan memiliki keahlian yang mengharuskan bekerja menggunakan mesin agar menghemat waktu dan memperbanyak produksi mengingat perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan sudut pandang individu, pengangguran merupakan kondisi yang tidak diinginkan yang menyebabkan keterbatasan ekonomi dan menghambat jenjang karir. Selain itu pengangguran merupakan masalah yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

ebaran tren pengangguran terbuka disuatu wilayah diperlukan analisa data sekunder yang menjadi penyebab pengangguran terbuka. Dengan dibantu analisa regresi data panel. Analisa regresi data panel menerapkan prinsip antara variabel *cross section* dan *time series*.



Gambar 1.2 Diagram Kerangka Penelitian

1.7 Batasan Operasional

1. Angka Pengangguran Terbuka

pengangguran adalah kondisi dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Untuk mengukur pengangguran dalam suatu negara biasanya digunakan tingkat pengangguran (*unemployment rate*) yaitu penganggur yang dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (Nanga, 2001).

2. Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menggambarkan penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. TPAK dapat menjadi indikator dari kualitas sumberdaya manusia disuatu wilayah.

3. Sebaran Geografis Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka dikelompokkan berdasarkan orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang pernah bekerja dan belum mulai bekerja, orang yang sedang mempersiapkan untuk bekerja, dan orang yang tidak mencari pekerjaan. Kegiatan mempersiapkan untuk memperoleh pekerjaan tidak terbatas dalam waktu seminggu saja. Sebaran geografis pengangguran terbuka berguna untuk mengetahui distribusi tingkat pengangguran terbuka di tiap-tiap wilayah agar pemerintah dapat mengontrol dan mengetahui faktor penyebabnya.

4. Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka

Faktor utama yang mempengaruhi pengangguran diantaranya adalah Upah Minimum kabupaten/kota. Menurut Mankiw (2000:154), UMR adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Oleh karena itu besar kecilnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh

terhadap tingkat pengangguran yang ada. Apabila tingkat upah turun maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka. pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya jumlah pengangguran akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan perubahan jumlah produk domestik regional bruto.